

REKLAME - PENYELENGGARAAN

2024

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG NO. 1, BD 2024 / 28 HLM.

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

- ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan agar penyelenggaraan reklame dapat lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, estetika dan lingkungan maka ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu diubah dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2020; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 109 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 16 Tahun 2021; PP Nomor 35 Tahun 2023; PermenPU Nomor 20 /PRT /M/2010; PermenPU Nomor 19/PRTM/2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Nomor 11 Tahun 2023.
  - Dalam Perbup ini mengatur penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung dan mencabut ketentuan penyelenggaraan reklame yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2024 .
- Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
  - Penyelenggara Reklame yang belum membayar pajak sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, dikenakan tariff pajak berdasarkan Peraturan Bupati ini.
  - Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 5 hlm.